

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG ATURAN BERPAKAIAN  
MUSLIM BAGI PESERTA DIDIK DI KOTA PADANG (STUDI  
KASUS: SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2  
PADANG)**

UNIVERSITAS ANDALAS  
**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Andalas*

**Oleh:**

**MUHAMMAD RYALZI ISTIQLAL**

**BP. 1910832021**



**Pembimbing:**

- 1. Dr. Tengku Rika Valentina, MA**
- 2. Dr. Irawati, MA**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : **Muhammad Ryalzi Istiqlal**  
Nomor Buku Pokok : **1910832021**  
Judul Skripsi : **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor  
5 Tahun 2011 Tentang Aturan Berpakaian Muslim  
Bagi Peserta Didik Di Kota Padang (Studi Kasus:  
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang)”**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua  
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

**Pembimbing I**



**Dr. Tengku Rika Valentina, MA**  
NIP. 198101012005012001

**Pembimbing II**



**Dr. Irawati, MA**  
NIP. 197910122005012002

**Mengetahui,**







**Ketua Departemen Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Tengku Rika Valentina, MA**  
NIP. 198101012005012001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Aturan Berpakaian Muslim Bagi Peserta Didik Di Kota Padang (Studi Kasus: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang)"** telah diuji di depan sidang Ujian Skripsi Departemen Ilmu Politik pada Tanggal 26 Agustus 2024, bertempat di Ruang Sidang Departemen Ilmu Politik, dengan Tim Penguji :

<b>Tim Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Drs. Tamrin, M.Si</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Dr. Doni Hendrik, M.Soc.Sc</b>	<b>Sekretaris</b>	
<b>Mhd Fajri, S.IP., MA</b>	<b>Anggota</b>	
<b>Andhik Beni Saputra, S.IP., MA</b>	<b>Anggota</b>	
<b>Dr. Tengku Rika Valentina, MA</b>	<b>Pembimbing I</b>	
<b>Dr. Irawati, MA</b>	<b>Pembimbing II</b>	

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Andalas**



## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Aturan Berpakaian Muslim Bagi Peserta Didik Di Kota Padang (Studi Kasus: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang)”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 17 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ryalzi Istiqlal

BP. 1910832021

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas dan menganalisis Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011, Pasal 14 Poin J, yang mengatur kewajiban berpakaian muslim bagi peserta didik di sekolah, serta pengaruhnya terhadap nonmuslim di SMKN 2 Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai adat dan agama Islam yang kuat di Sumatra Barat, yang tercermin dalam berbagai kebijakan daerah. Kasus yang mencuri perhatian yaitu pemaksaan atribut berupa jilbab terhadap siswi nonmuslim pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2011, khususnya Pasal 14 Poin J, yang mengatur kewajiban berpakaian muslim bagi peserta didik, serta implementasinya terhadap siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III sebagai kerangka utama, serta mengkaji bagaimana variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi berperan dalam memengaruhi implementasi kebijakan terkait atribut jilbab sehingga menimbulkan polemik akan kaitannya dengan peserta didik nonmuslim. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi yang kurang maksimal kepada pelaksana dan sumber daya yang kurang memadai turut berkontribusi dalam penafsiran kebijakan yang salah. Disposisi pelaksana yang turut menguatkan bias implementasi, persepsi pelaksana terhadap aturan berjilbab bagi siswi muslim dipahami secara keliru oleh pelaksana, sehingga terjadi penerapan yang tidak semestinya kepada siswi nonmuslim. Struktur birokrasi dalam bentuk pengawasan yang kurang ketat juga mengakibatkan interpretasi yang diskriminatif. Temuan ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih tepat dalam penyampaian dan pengawasan kebijakan agar aturan daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberagaman yang adil.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Diskriminasi



## ABSTRACT

*This research discusses and analyses the Regional Regulation (Perda) of Padang City Number 5 of 2011, Article 14 Point J, which mandates Islamic dress for students in schools, and its impact on nonmuslim students at SMKN 2 Padang. This study is motivated by the strong traditional and Islamic values in West Sumatra, which are reflected in various regional policies. A notable case that garnered attention was the imposition of the hijab on nonmuslim female students in 2021. The study aims to examine the implementation of Padang City's Regional Regulation No. 5 of 2011, specifically Article 14 Point J, concerning the obligation of Islamic dress for students, and its enforcement on nonmuslim female students at SMKN 2 Padang. The research employs George C. Edwards III's policy implementation theory as the primary framework, examining how variables such as communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure influence the implementation of the hijab-related policy, thereby creating controversy regarding its application to nonmuslim students. This study utilises a qualitative approach with a case study method. The findings reveal that insufficient communication with implementers and inadequate resources have led to misinterpretation of the policy. The implementers' disposition further reinforces biased implementation; their perception of the hijab requirement for muslim female students is misunderstood, resulting in improper enforcement on nonmuslim students. Additionally, the bureaucratic structure's lack of stringent oversight has facilitated discriminatory interpretation. These findings underscore the need for a more inclusive approach to the communication and supervision of policies to ensure that regional regulations align with principles of equitable diversity.*

**Keywords:** *Implementation, Regional Regulation, Discrimination*

